

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran umum dan Perkembangan bank syariah di indonesia

Bank Syariah atau bank islam pada negara lain adalah bank yang menjalankan setiap kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip syariah dengan perjanjian-perjanjian yang berdasar hukum. Bank yang merupakan sebuah lembaga intermediasi dan penyedia layanan jasa keuangan haruslah bekerja secara etika dan sistem nilai islam karena itu khususnya dalam bank syariah haruslah terhindar dari beberapa unsur yang memiliki dampak merugikan seperti adanya riba, gharar dan masyir serta memiliki prinsip keadilan . dengan dilarangnya judi, masyir dan riba dalam bank syariah ini maka aliran investasi dapat menjadi lebih optimal dan ter salurkan ke sektor produktif. Seperti dalam konvesional dengan sisitem bunga maka membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dikarenakan terhambat, sebaliknya bila tidak adanya masyir maka sebagian investasi dapat tersalur secara produktif.

Dalam bank syariah ini sendiri memiliki peran sebagai badan usaha dan badan sosial, sedangkan berdasar fungsinya dapat sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Selain itu pada bank syariah juga memiliki beberapa usaha dengan prinsip bagi hasil yang dimana merupakan sebagai landasan utama dalam setiap operasinya,karena itu jnis peghimpunan dana yang dilakukan

berupa prinsip bagi hasil, jual-beli ataupun sewa-menyewa. Apabila kita perhatikan perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terus mengalami pasang surut, akan tetapi masyarakat sebenarnya telah menginginkan sebuah transaksi yang tidak mengandung riba dan pada akhirnya ketika tahun 1990 menjadi titik awal bagi bank syariah berdiri dengan didominasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghasilkan pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 1992 (Antonio, 2001). Pada perkembangannya perbankan syariah Indonesia tidaklah terlepas dari pemerintah Indonesia terutama setelah tahun 1998 dimana setelah kejadian krisis moneter bank muamalat Indonesia mampu bertahan ketika bank konvensional lainnya memiliki suku bunga yang sangat tinggi, oleh karena itu tahun 1998 menjadikan sebagai pembatas atas kebijakan pemerintah mengenai bank syariah.

Akan tetapi dalam perjalanannya bank syariah belum mampu memberikan akan produk-produk terhadap masyarakat sesuai dengan syariah secara baik, lambatnya perkembangan bank syariah ini disebabkan karena bank syariah hanya dapat tumbuh melalui perluasan bank syariah yang sudah ada atau melakukan pembukaan bank syariah yang tentunya membutuhkan investasi yang besar (Ascarya, 2005). Setelah pesatnya perkembangan bank syariah ini maka bank Indonesia mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan bank yang diamanahkan oleh undang-undang. Perbaikan dan perkembangan pada bank syariah teruslah

dilakukan agar perkembangannya selalu berada pada posisi yang sesuai, disamping berkembangnya bank syariah menurut Ascarya (2005) ada memiliki beberapa tantangan utama dalam perkembangannya yaitu:

1. besarnya potensi pasar akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa masih sangat rendah.
2. infrastruktur pendukung yang belum memadai, perangkat pengaturan yang belum memadai.
3. perlu adanya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas agar mampu bersaing,.
4. Kerangka pengaturan masih banyak yang belum lengkap sesuai karakter bank syariah.

Dalam menjalankan tantangannya tentunya bank syariah ju terkadang mendapatkan kendala dalam melakukan pengembangannya, Menurut Bank Indonesia kendala tersebut yaitu:

1. Masih kurangnya SDM yang kompeten dan profesional.
2. Belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk.
3. Pemahaman masyarakat masih sangat minim sebagai pengguna perbankan syariah.
4. Masih lambatnya inovasi pada produk syariah.
5. Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah berkaitan dengan pajak dan aspek legal.

Menurut Bank Indonesia, supaya arah pada pengembangan dalam perbankan syariah sesuai dengan yang diinginkan maka ditetapkanlah beberapa prinsip pokok untuk sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan ketentuan pengembangan perbankan syariah, yaitu :

1. Melakukan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah yang diserahkan sepenuhnya terhadap mekanisme pasar, dalam hal ini bank syariah lebih ditekankan pada penciptaan perangkat agar dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha yang sehat, efisien dan dengan prinsip syariah.
2. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan atau memberi perlakuan khusus antara bank syariah dan bank konvensional.
3. Melakukan pengembangan dalam perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan yang berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap.
4. Pengembangan dan pengaturan pada perbankan syariah menerapkan pada prinsip universalitas sesuai akan nilai dasar Islam.

B. Gambaran Umum Variabel penelitian

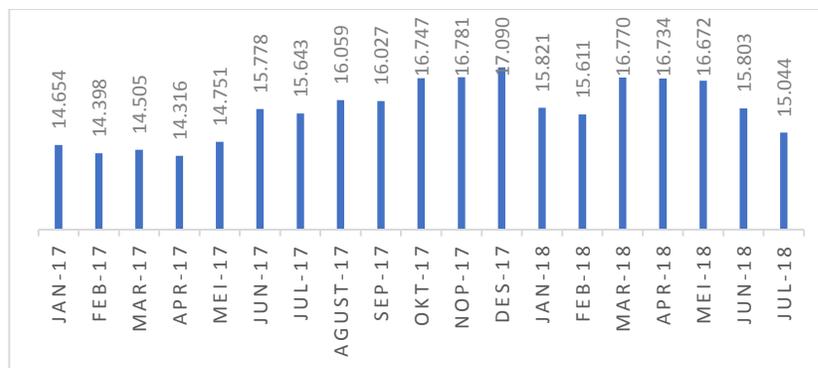
Pada Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dengan variabel Mudharabah, NPF, DPK, Biaya Promosi dan BOPO.

1. Perkembangan variabel pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil data perkembangan pembiayaan Mudharabah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini

Gambar 4.1

Perkembangan pembiayaan Mudharabah



Sumber : Data diolah

Berdasarkan gambar pada 4.1 dapat dilihat bahwa grafik dalam pembiayaan mudharabah menunjukkan tingkat yang fluktuatif pada Januari 2017 sampai Juli 2018, dari grafik tersebut pembiayaan mudharabah tertinggi berada pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 17.090 triliun dan pembiayaan mudharabah terendah berada pada sebesar Rp. 14.316 triliun.

Dalam perkembangannya, pembiayaan mudharabah cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya hal ini tentunya sangatlah

memiliki dampak yang menguntungkan bagi dana pihak ketiga khususnya karena dengan meningkatnya pembiayaan mudharabah ini akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan.

2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan pada hasil data perkembangan variabel Dana Pihak Ketiga yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

Gambar 4.2

Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil gambar pada 4.2 menunjukkan bahwa pada variabel DPK dalam periode bulan januri 2017 sampai juli 2018 cenderung terus melakukan peningkatan pada tiap bulannya. Dari grafik tersebut perkembangan DPK dengan jumlah tertinggi berada pada bulan juni 2018

yaitu Rp. 341.216 triliun, sedangkan jumlah DPK terendah terjadi pada Januari 2017 yaitu sebesar Rp. 277.714 triliun.

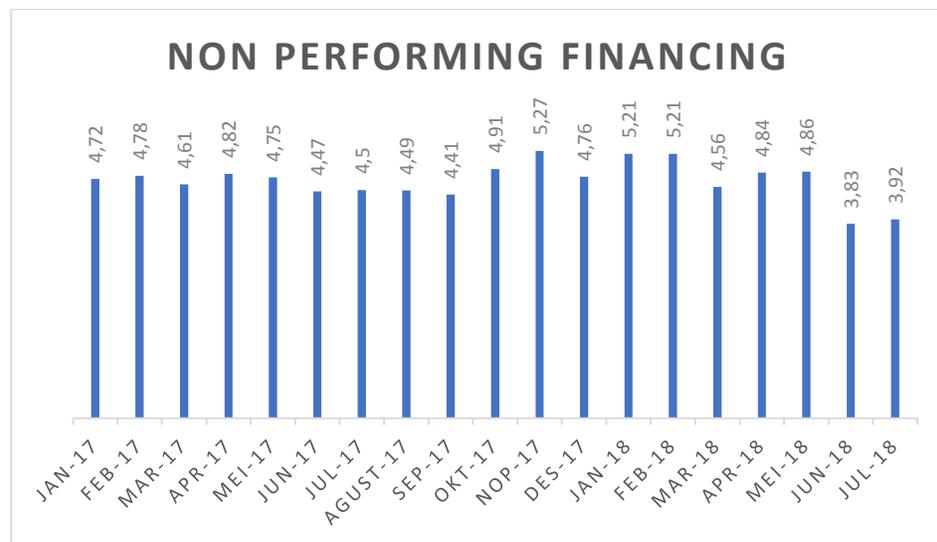
Melihat pada grafik DPK yang terus mengalami peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir tentunya sangat menjadi hal yang positif, karena tentunya dengan semakin tingginya DPK maka akan meningkat dari segi pembiayaan karena bank dapat menyalurkannya ke setiap unit usahanya.

3. Perkembangan Variabel Non Performing Financing

Berdasarkan pada hasil data perkembangan variabel Non Performing Financing (NPF) yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3

Perkembangan Non Performing Financing



Sumber: Data diolah

Berdasarkan data gambar pada 4.3 yang menunjukkan bahwa pada perkembangannya dari periode Januari 2017 sampai Juli 2018 menunjukkan adanya perkembangan secara fluktuatif, pada Rasio ini mengalami NPF tertinggi yaitu pada bulan November 2017 sebesar 5,27 %, sedangkan tingkat rasio NPF terendah terdapat pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 3,83 % .

Dari hasil pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel NPF ini semakin rendah tingkat rasionya maka akan semakin baik untuk memberikan profit kepada bank, pada beberapa bulan terdapat tingginya rasio NPF ini disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pengembalian pinjaman. Hal ini tentunya menjadi evaluasi khusus bagi pihak bank untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.

4. Perkembangan variabel Biaya Promosi

Berdasarkan data hasil perkembangan variabel Biaya Promosi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini:

Gambar 4.4

Perkembangan Biaya Promosi



Sumber: Data diolah

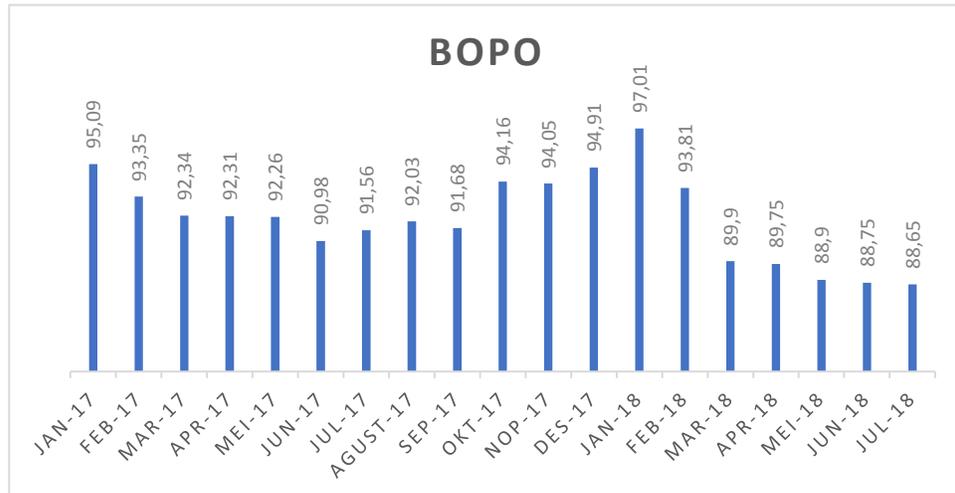
Berdasarkan pada grafik 4.4 yang menunjukkan bahwa perkembangan variabel biaya promosi pada tiap tahunnya mengalami hal yang naik-turun dalam perkembangannya. Dapat dilihat perkembangan tertinggi pada variabel biaya promosi terjadi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 397.000 triliun

Melihat perkembangan pada biaya promosi sangatlah positif meskipun pada bulan Januari 2018 mengalami penurunan drastis akan tetapi pada bulan-bulan selanjutnya terus mengalami peningkatan, tentunya dengan peningkatan biaya promosi ini dapat memberikan keuntungan agar bank dapat terus bertahan. Biaya promosi dengan strategi yang baik tentunya sangatlah dibutuhkan oleh bank mengingat persaingan perbankan yang semakin ketat.

5. Perkembangan variabel BOPO

Berdasarkan padari hasil data perkembangan variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang diperoleh dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini:



Sumber: Data diolah

Berdasarkan grafik 4.5, maka dapat dilihat bahwa perkembangan BOPO selalu mengalami naik-turun atau fluktuatif dalam perkembangannya. Nilai rasio BOPO tertinggi berada pada bulan januari 2018 dengan besaran 97,01 %, sebaliknya pada rasio BOPO terkecil berada pada juli 2018 sebesar 88,65 %.

Melihat grafik tersebut, nilai rasio BOPO pada bulan januari sangat lah tinggi, hal ini tetntunya akan memiliki dampak negatif terhadap efsiesi kinerja keuangan pada bank. Sebaliknya, nilai terendah ada pada bulan juli 2018 yang tentunya sangatlah bisa menghasilkan keuntungan bagi bank, karena dengan tingginya BOPO maka menammbah beban pada bank.